



Katalog BPS : 6104009.82

**GAMBARAN INDUSTRI
MIKRO DAN KECIL
PROVINSI MALUKU UTARA
2014**

<http://malut.bps.go.id>



BADAN PUSAT STATISTIK

Gambaran Industri Mikro dan Kecil Provinsi Maluku Utara 2014

<http://maluku.bps.go.id>

Gambaran Industri Mikro dan Kecil Provinsi Maluku Utara 2014

Katalog BPS : 6104009.82
No. Publikasi : 82530.1501
Ukuran Buku : 21,5 cm x 16,5 cm
Jumlah Halaman : xi + 63
Naskah : BPS Provinsi Maluku Utara
Desain Sampul : Bidang Statistik Produksi
Diterbitkan oleh : BPS Provinsi Maluku Utara

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya

Kata Pengantar

Publikasi Gambaran Industri Mikro dan Kecil (IMK) Provinsi Maluku Utara 2014 ini merupakan publikasi hasil pelaksanaan Survei Industri Mikro dan Kecil Tahun 2014 (VIMK14).

Publikasi ini menyajikan data tentang kegiatan usaha sektor industri manufaktur yang mempunyai tenaga kerja 1 – 19 orang, yang antara lain meliputi banyaknya perusahaan, tenaga kerja, balas jasa pekerja, pengeluaran, pendapatan, permodalan, kesulitan usaha, pelayanan usaha, dan bimbingan usaha serta distribusi dan pemasaran Industri Mikro dan Kecil di Provinsi Maluku Utara.

Disadari bahwa publikasi ini masih jauh dari lengkap dan sempurna, oleh karena itu, kritik dan saran sangat diharapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan pada pada publikasi yang akan datang. Semoga publikasi ini dapat bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat, baik dalam penentuan kebijakan, penelitian, analisis data, evaluasi program, maupun keperluan lainnya.

Ternate, Juli 2015
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Maluku Utara,



M. Habibullah, S.Si, M.Si.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	iii - iv
DAFTAR ISI	v - xi
PENJELASAN UMUM	1 – 17
RINGKASAN EKSEKUTIF	18 – 27
DAFTAR TABEL	28 – 47
Tabel 1. Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil menurut Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014	29
Tabel 2. Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil di Wilayah Maluku-Papua menurut Kelompok Tenaga Kerja Tahun 2014	30
Tabel 3. Banyaknya Usaha, Tenaga Kerja, Pendapatan, Pengeluaran, dan Balas Jasa Pekerja pada Usaha Mikro dan Kecil di Wilayah Maluku-Papua Tahun 2014	31
Tabel 4. Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil dan Rata-rata Jam Kerja per Hari di Wilayah Maluku-Papua menurut Jumlah Hari Kerja dalam Sebulan Tahun 2014	32
Tabel 5. Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil di Wilayah Maluku-Papua menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Pengusaha Tahun 2014	34
Tabel 6. Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil di Wilayah Maluku-Papua menurut Kelompok Umur Pengusaha Tahun 2014	35

Tabel	7.	Banyaknya Tenaga Kerja pada Usaha Mikro dan Kecil di Wilayah Maluku-Papua menurut Jenis Kelamin dan Jenis Tenaga Kerja Tahun 2014	36
Tabel	8.	Banyaknya Tanaga Kerja Usaha Mikro dan Kecil di Wilayah Maluku-Papua menurut Status Pekerja dan Jenis Kelamin Tahun 2014	38
Tabel	9.	Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil di Wilayah Maluku-Papua menurut Balas Jasa per Pekerja Dibayar per Bulan Tahun 2014	40
Tabel	10.	Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil di Wilayah Maluku-Papua menurut Besaran Pendapatan Setahun Tahun 2014 .	42
Tabel	11.	Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil di Wilayah Maluku-Papua menurut Sumber Modal Tahun 2014	44
Tabel	12.	Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil di Wilayah Maluku-Papua menurut Asal Pinjaman Utama Tahun 2014	45
Tabel	13.	Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil di Wilayah Maluku-Papua menurut Asal Alasan Utama Tidak Meminjam dari Bank Tahun 2014	47
Tabel	14.	Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil di Wilayah Maluku-Papua yang Meminjam dari Bank menurut Besarnya Pinjaman Tahun 2014	49
Tabel	15.	Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil di Wilayah Maluku-Papua menurut Jenis Kredit Bersubsidi Tahun 2014	50
Tabel	16.	Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil di Wilayah Maluku-Papua menurut Jenis Kesulitan Utama Tahun 2014	51

Tabel	17.	Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil di Wilayah Maluku-Papua menurut Jenis Kesulitan Utama Bahan Baku Tahun 2014	53
Tabel	18.	Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil di Wilayah Maluku-Papua yang Menjalिन Kemitraan dengan Usaha Lain menurut Jenis Kemitraan yang Diterima Tahun 2014	54
Tabel	19.	Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil di Wilayah Maluku-Papua menurut Badan/Lembaga yang Menjalिन Kemitraan Tahun 2014	56
Tabel	20.	Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil yang menjadi Anggota Koperasi di Wilayah Maluku-Papua menurut Jenis Pelayanan yang Diterima Tahun 2014	58
Tabel	21.	Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil yang Menerima Pelayanan/Bantuan di Wilayah Maluku-Papua menurut Badan/Lembaga yang Memberi Bantuan Tahun 2014	60
Tabel	22.	Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil di Wilayah Maluku-Papua menurut Alasan Utama Tidak Menerima Pelayanan/Bantuan Tahun 2014	62
Tabel	23.	Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil di Wilayah Maluku-Papua menurut Lokasi Pemasaran Hasil Produksi Tahun 2014	63

Penjelasan Umum

<http://www.kalut.bps.go.id>

PENJELASAN UMUM

A. Pendahuluan

Menyongsong pasar bebas ASEAN atau penyatuan masyarakat ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community/AEC*) tahun 2015 ini, penting bagi kita untuk memperkuat sistem perekonomian. Memanfaatkan sumber daya manusia secara efisien dan produktif dengan suatu cara yang membuat setiap individu mampu memberdayakan kemampuan yang dimiliki oleh setiap individu tersebut dalam merealisasikan kesejahteraan mereka masing-masing, merupakan salah satu cara yang paling konstruktif dalam merealisasikan visi kesejahteraan lahir bathin bagi masyarakat. Dalam era reformasi, perekonomian dibangun berlandaskan sistem ekonomi kerakyatan, dimana komponen utama ekonomi kerakyatan adalah sumber daya manusia sebagai konsumen, sebagai tenaga kerja, dan sebagai pengusaha. Dengan demikian, sistem ekonomi kerakyatan merupakan tatanan ekonomi yang memberikan kesempatan kerja dan berusaha seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mencapai peningkatan kesejahteraan secara merata dan berkeadilan. Secara kongkret, upaya peningkatan ekonomi masyarakat harus dilakukan dalam berbagai program, diantaranya pembangunan Industri Mikro dan Kecil (IMK).

Intensitas tenaga kerja yang relatif lebih tinggi dan jumlah investasi yang relatif kecil mengakibatkan usaha IMK lebih fleksibel dan mampu beradaptasi terhadap perubahan pasar menyebabkan IMK mempunyai peran yang sangat vital dalam pembangunan ekonomi. IMK tidak terlalu terpengaruh oleh tekanan eksternal, karena karena dapat tanggap menangkap peluang untuk substitusi impor dan meningkatkan persediaan domestik. Pengembangan IMK dapat memberikan kontribusi pada diversifikasi industri dan percepatan perubahan struktur sebagai pra kondisi pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang stabil dan berkesinambungan.

Untuk mendata keberadaan, penyebaran, aktivitas, dan karakteristik kegiatan IMK, maka diselenggarakan Survei Industri Mikro Kecil Tahun 2014 (VIMK14). Pendekatan pencacahan VIMK14 dilakukan melalui pendekatan perusahaan/usaha. Sasaran pencacahan VIMK14 adalah perusahaan/usaha berskala mikro dengan tenaga kerja 1-4 orang dan industri kecil dengan tenaga kerja 5-19 orang termasuk pengusaha/pemilik.

B. Tujuan

Secara umum VIMK14 bertujuan untuk mengetahui profil IMK daerah potensi yang dapat digunakan sebagai bahan perencanaan kegiatan ekonomi secara makro. Data yang dikumpulkan dan disajikan hasil pencacahan VIMK14 merupakan data tentang kegiatan perusahaan/usaha berskala mikro dan kecil yang rinci serta mutakhir menurut Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).

Adapun tujuan VIMK14 secara khusus adalah mendapatkan informasi dasar tentang berbagai keterangan mengenai kegiatan ekonomi menurut dua digit KBLI, sebagai estimasi Indikator IMK seperti:

- a. Banyaknya usaha
- b. Banyaknya tenaga kerja
- c. Pengeluaran untuk tenaga kerja
- d. Struktur input dan output
- e. Kendala dan prospek usaha
- f. Keterangan lain yang berkaitan dengan usaha IMK

C. Lingkup dan Cakupan

VIMK14 ini dilaksanakan pada 93 blok sensus terpilih dan mencakup 650 perusahaan/usaha mikro dan kecil yang tersebar di seluruh kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Maluku Utara. Sasaran pencacahan meliputi perusahaan/usaha

industri mikro dengan banyaknya tenaga kerja 1-4 orang dan industri kecil dengan tenaga kerja 5-19 orang termasuk pengusaha/pemilik.

D. Dokumen yang Digunakan

Untuk pelaksanaan VIMK14 ini, menggunakan beberapa jenis daftar dan buku pedoman. Adapun jenis daftar dan buku pedoman yang digunakan dalam pencacahan perusahaan/usaha industri mikro dan kecil serta kegunaannya ada sebagai berikut:

1. **VIMK14-DSBS Tahunan (Daftar Sampel Blok Sensus)**, digunakan untuk mengetahui identitas blok sensus terpilih.
2. **VIMK14-L2 (Listing)**, digunakan untuk pendaftaran perusahaan/usaha dalam blok sensus terpilih.
3. **VIMK14-RB2 (Rekap Blok Sensus)**, digunakan untuk jumlah Industri Mikro dan Kecil per blok sensus.
4. **VIMK14-DS2 (Daftar Sampel)**, digunakan untuk mengetahui nama dan alamat perusahaan/usaha yang akan dicacah.
5. **VIMK14-S (Sampel)**, digunakan untuk mencacah perusahaan/usaha terpilih.
6. Buku pedoman teknis, pedoman pencacah, pedoman pemeriksaan/pengawasan, buku KBLI Industri Manufaktur, dan pedoman pengolahan.

E. Metodologi

1. Kerangka Sampel

Kerangka sampel untuk pemilihan blok sensus dan kerangka sampel untuk pemilihan usaha adalah jenis-jenis kerangka sampel yang digunakan dalam VIMK14. Dengan uraian masing-masing kerangka sampel sebagai berikut:

- a. Kerangka sampel blok sensus yang digunakan adalah daftar blok sensus yang dilengkapi dengan informasi jumlah usaha industri mikro dan kecil (IMK) hasil pencacahan Sensus Ekonomi 2006 (SE2006).
- b. Kerangka sampel usaha usaha adal daftar usaha hasil pendaftaran Survei IMK 2014 yang dibedakan menurut usaha industri kecil dan usaha industri mikro.

2. Stratifikasi Blok Sensus

Pada Survei IMK 2014 stratifikasi blok sensus yang digunakan sama dengan stratifikasi yang dibentuk berdasarkan hasil SE 2006. Tujuan dilakukannya stratifikasi blok sensus adalah untuk mengelompokkan blok sensus menjadi kelompok-kelompok berdasarkan jumlah relatif usaha Industri Mikro dan Kecil (IMK) menurut jenis Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Untuk setiap jenis KBLI, stratifikasi konsentrasi yang bersesuaian dengan jenis usaha adalah sekelompok blok sensus dengan komposisi jenis usaha yang dominan (menonjol). Stratifikasi blok sensus dilaksanakan pada level provinsi.

3. Prosedur Penarikan Sampel

Rancangan penarikan sampel yang digunakan adalah penarikan sampel dua tahap terstratifikasi (*stratified two-stage sampling*).

Tahap pertama, dari kerangka sampel blok sensus dipilih 99 blok sensus secara *probability proportional to size/pps* dengan *size* banyaknya usaha IMK hasil pendataan Sensus Ekonomi 2006. Penarikan sampel blok sensus antar strata dilakukan secara *independent*.

Tahap kedua, dari kerangka sampel usaha, seluruh industri kecil dipilih sebagai sampel, dan dilakukan pemilihan sejumlah industri mikro dari hasil pendaftaran IMK secara sistematis linier untuk setiap jenis usaha sesuai KBLI pada blok sensus terpilih. Bila jumlah industri kecil dalam suatu provinsi melebihi target sampel IMK, maka harus

dilakukan pemilihan sampel untuk industri kecil. Jumlah sampel Survei IMK 2014 Provinsi Maluku Utara adalah sebanyak 93 blok sensus dan 650 usaha IMK.

4. Alokasi Sampel Usaha IMK Per Kabupaten/Kota

Pengalokasian target pencacahan untuk industri mikro dan industri kecil dilakukan berdasarkan hasil listing. Khusus untuk industri kecil, seluruh usaha dalam tiap blok sensus terpilih dilakukan pencacahan lengkap (*take all*) kecuali jika jumlahnya melebihi target usaha IMK atau industrinya homogen, maka harus dilakukan pemilihan sampel, industri industri mikro dilakukan pencacahan hanya pada usaha terpilih.

Alokasi sampel usaha industri mikro dan kecil (IMK) dilakukan oleh BPS Provinsi Maluku Utara berdasarkan rekapitulasi jumlah IMK hasil listing per kabupaten/kota. Sedangkan alokasi sampel industri mikro (IM) per kabupaten/kota dilakukan setelah sebelumnya mengurangi target IMK provinsi dengan jumlah industri industri kecil (IK) sebagai sampel. Alokasi IM dilakukan secara *square root proportional* terhadap jumlah *square root* IM di masing-masing kabupaten/kota. Hasil alokasi IM per kabupaten/kota dikembalikan ke masing-masing kabupaten/kota, untuk selanjutnya dilakukan alokasi menurut KBLI.

F. Organisasi Lapangan

Untuk kelancaran pelaksanaan lapangan VIMK14, struktur organisasi lapangan telah ditetapkan yang penanggung jawab pelaksanaannya di Provinsi Maluku Utara adalah Kepala Bidang Statistik Produksi BPS Provinsi Maluku Utara, sedangkan *subject matter* adalah Sub Direktorat Statistik Industri Kecil dan Rumah Tangga BPS-RI.

Petugas yang terkait dalam VIMK14 adalah:

- a. Petugas Pencacah Sampel (PCS): Koordinator Statistik Kecamatan (KSK)/Staf BPS/Mitra Statistik.
- b. Petugas Pemeriksa: Staf BPS Provinsi/Kabupaten/Kota.

- c. Koordinator Pelaksanaan di Kecamatan: KSK (Aparat BPS pada tingkat kecamatan).
- d. Koordinator Pelaksanaan di tingkat Kabupaten/Kota: Kepala BPS Kabupaten/Kota.
- e. Koordinator Pelaksanaan di tingkat Provinsi: Kepala BPS Provinsi Maluku Utara.

G. Konsep dan Definisi

Agar persepsi terhadap informasi yang dihasilkan tidak bias, sangat diperlukan konsep dan definisi. Untuk itu, beberapa hal yang perlu didefinisikan dari kegiatan VIMK14, yaitu:

- a. **Industri Manufaktur:** Kegiatan produksi yang mengubah barang dasar (bahan mentah) menjadi barang jadi/setengah jadi dan atau dari barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya. Termasuk dalam kategori ini adalah kegiatan jasa industri manufaktur (*makloon*).
- b. **Perusahaan/Usaha Industri Manufaktur:** Unit kegiatan ekonomi yang melakukan/mengusahakan industri manufaktur; terletak pada suatu bangunan/lokasi tertentu serta ada seorang atau lebih yang bertanggung jawab atas usaha tersebut.
- c. **Perusahaan/Usaha Jasa Industri Manufaktur:** Unit kegiatan dari suatu industri yang melayani keperluan pihak lain. Pada kegiatan ini bahan baku disediakan oleh pihak yang dilayani dan pihak perusahaan/usaha melaksanakan proses pengolahannya dengan memperoleh pembayaran sebagai balan jasanya (nilai upah *makloon*).
- d. **Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)** merupakan klasifikasi baku statistic mengenai kegiatan ekonomi yang terdapat di Indonesia. KBLI hanya mengelompokkan unit produksi menurut kegiatan ekonomi, tidak membedakan unit produksi menurut kepemilikan, jenis badan hukum, formal

atau informal. KBLI yang digunakan adalah KBLI 2009 yang menggunakan kode 5 digit yang menunjukkan struktur klasifikasi.

e. Produksi Utama

Produksi utama yang dihasilkan usaha ini ditentukan berdasarkan:

- 1) Produksi yang mempunyai nilai **produksi/jasa industri** terbesar;
- 2) Jika nilai produksi/jasa industri sama besar, maka produksi yang menghasilkan barang/jasa dengan **volume** terbesar;
- 3) Jika nilai produksi/jasa industri dan volume barang/jasa sama besar, maka produksi yang menghasilkan barang/jasa dengan **waktu** terlama;
- 4) Jika nilai/produksi, volume, dan waktu yang diperlukan sama, maka ditentukan menurut **pengakuan** responden.

f. Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

- 1) **Tidak Tamat SD:** Mereka yang tidak sekolah/belum pernah sekolah atau mereka yang pernah sekolah/tidak tamat di sekolah dasar 5/6/7 tahun, Sekolah Luar Biasa Tingkat Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Dasar Pamong (Pendidikan Anak oleh Masyarakat Orang Tua dan Guru), Sekolah Dasar Kecil, Paket A1 – A100. Mereka yang tamat Sekolah Dasar 3 tahun atau sederajat dianggap belum tamat.
- 2) **SD & Sederajat:** Mereka yang tamat sekolah dasar 5/6/7 tahun, Sekolah Luar Biasa Tingkat Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Dasar Pamong (Pendidikan Anak oleh Masyarakat Orang Tua dan Guru), Sekolah Dasar Kecil, Paket A1 – A100.
- 3) **SLTP & Sederajat:** Mereka yang tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP), MULO, HBS 3 tahun, SLB Menengah Tingkat Pertama, Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Kepandaian Putri, Sekolah Menengah Ekonomi Pertama (SMEP), Sekolah Teknik (ST), Sekolah Kesejahteraan Keluarga Pertama (SKKP), Sekolah Ketrampilan Kejuruan Pertama (SKKP) 4 tahun, Sekolah Usaha Tani, Sekolah Pertanian Menengah Pertama (SPMP), Sekolah Guru Bantu (SGB), Pendidikan Guru Agama (PGA) 4 tahun, Kursus Pegawai Administrasi (KPA), Kursus Karyawan Perusahaan (KKP), dan Pendidikan Pegawai Urusan Peradilan Agama (PPUPA).

- 4) **SLTA & Sederajat:** Mereka yang tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Umum (SMU), HBS 5 tahun, AMS, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial (SMPS), Sekolah Menengah Industri Kerajinan, Sekolah Menengah Seni Rupa, Sekolah Menengah Karawitan Indonesia, Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA), Sekolah Teknologi Menengah (STM), Sekolah Teknologi Menengah Pembangunan, Sekolah Menengah Musik, Sekolah Menengah Teknologi Pertanian, Sekolah Menengah Teknologi Perkapalan, Sekolah Menengah Teknologi Pertambangan, Sekolah Menengah Teknologi Grafika, Sekolah Kesejahteraan Keluarga Atas (SKKA), Sekolah Pendidikan Guru (SPG), Sekolah Ketrampilan Kejuruan Atas (SKKA), Sekolah Pertanian Menengah Atas (SPMA).
- 5) **DI/DII:** Mereka yang tamat Sekolah Guru Olah Raga (SGO), Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa, Pendidikan Guru Sekolah Lanjutan Pertama (PGSLP), Pendidikan Guru Agama (PGA) 6 tahun, Sekolah Guru Taman Kanak-Kanak (SGTK), Kursus Pendidikan Guru (KPG), Sekolah Analisis Menengah Kimia Atas, Sekolah Asisten Apoteker, Sekolah Bidan, Sekolah Pengatur Rontgen, dan Kursus Pegawai Administrasi Atas (KPAA), Diploma I atau Diploma II pada suatu pendidikan yang khusus diberikan untuk program diploma. Program Akta I dan Akta II termasuk dalam jenjang pendidikan program Diploma I atau Diploma II.
- 6) **Sarjana Muda/DIII:** Mereka yang tamat Akademi/Diploma III/Akta III atau yang telah mendapatkan gelar sarjana muda pada suatu fakultas. Bagi mereka yang telah menempuh pendidikan sampai semester 8/9 dan belum tamat di fakultas yang tidak mengeluarkan gelar sarjana muda dinyatakan sebagai tamatan SLTA & sederajat.
- 7) **DIV, S1 atau Lebih:** Mereka yang tamat program pendidikan DIV, Sarjana (Strata-1), Magister (Strata-2), dan Doktor (Strata-3). Jenjang sekolah ini pada umumnya dilakukan oleh suatu Universitas/Institut/Sekolah Tinggi.

g. Tahun Mulai Beroperasi/Berproduksi secara Komersial

Tahun pertama kali perusahaan menghasilkan/memproduksi barang/jasa secara komersial (tidak termasuk produksi percobaan). Bila terjadi perubahan KBLI, maka yang ditulis tahun pada KBLI yang baru. Suatu usaha yang membuka cabang di suatu daerah, maka tahun mulai beroperasi adalah tahun dibukanya cabang di tempat tersebut.

h. Tenaga Kerja

- 1) **Tenaga kerja tetap dibayar:** Tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan/usaha dengan mendapat balas jasa berupa gaji dan lainnya (lembur, hadiah, bonus, dll) dalam bentuk uang maupun barang.
 - 2) **Tenaga kerja tetap tidak dibayar:** Tenaga kerja pemilik dan atau tenaga kerja keluarga yang biasanya aktif dalam kegiatan perusahaan/usaha, tetapi tidak mendapat balas jasa. Bagi pekerja tidak dinayar yang bekerja **kurang dari 1/3 (sepertiga) jam kerja** yang biasa berlaku (dalam satu minggu) di perusahaan/usaha **tidak termasuk sebagai pekerja**.
 - 3) **Tenaga kerja produksi:** Tenaga kerja yang langsung bekerja/berhubungan dalam proses produksi. Missal: tenaga kerja yang langsung mengawasi proses produksi, mengoperasikan mesin, mencatat bahan baku yang digunakan dan barang yang dihasilkan.
 - 4) **Tenaga kerja lainnya:** Tenaga kerja yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi. Tenaga kerja ini biasanya sebagai tenaga kerja pendukung perusahaan, seperti; manager (bukan produksi), kepala personalia, sekretaris, tukang ketik, penjaga malam, sopir perusahaan, dan lain-lain.
- i. Balas Jasa Pekerja Dibayar (Dalam Rupiah):** Balas jasa pekerja dibayar dibedakan atas upah pekerja tetap dan tidak tetap.
- 1) **Upah/gaji:** Balas jasa perusahaan untuk pekerja/karyawan, sebelum dikurangi pajak baik dalam bentuk uang maupun barang. Perkiraan sewa rumah dinas, fasilitas kendaraan dan sejenisnya dimasukkan dalam upah dan gaji walaupun tidak tertulis dalam neraca (catatan) perusahaan.

- 2) **Upah lembur:** Upah yang diberikan/dibayarkan kepada pekerja yang bekerja di luar jam kerja biasa.
 - 3) **Hadiah:** Pengeluaran perusahaan/usaha berupa uang dan atau barang yang diberikan kepada pekerja/karyawan. Pengeluaran ini sifatnya hanya sewaktu-waktu saja. Pengeluaran selama sebulan diperoleh dengan menjumlahkan pengeluaran selama setahun dibagi 12.
 - 4) **Bonus:** Pemberian perusahaan/usaha kepada pekerja dalam bentuk uang atau barang karena perusahaan/usaha mengalami kemajuan/peningkatan keuntungan, yang biasanya dibayarkan setahun sekali, oleh karenanya untuk mengetahui besarnya bonus dalam sebulan terlebih dulu dibagi 12.
 - 5) **Tunjangan:** Pengeluaran perusahaan/usaha berupa uang dan tau barang yang dibayarkan kepada instansi/yayasan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pekerja/karyawan.
- j. **Biaya Umum :** Biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan perusahaan/usaha meliputi:
- 1) **Bahan Baku:** Komponen bahan yang digunakan untuk membantu proses produksi untuk menghasilkan barang/jasa.
 - 2) **Bahan Penolong:** Bahan yang digunakan untuk membantu proses produksi dari bahan baku menjadi barang produksi, tidak termasuk bahan penolong: pembungkus, pengepak, dan pengikat barang jadi.
 - 3) **Bahan Bakar:** Segala bahan, baik cair maupun padat yang digunakan sebagai pembakar untuk menjalankan mesin, memasak dan lainnya yang dipakai untuk usaha, seperti: bensin, solar, minyak tanah, LPG, batu bara/briket, kayu bakar, arang dan bahan bakar lainnya.
 - 4) **Pelumas:** Zat cair yang mempunyai kekentalan tertentu dipakai untuk melancarkan jalannya mesin agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya, seperti SAE 20, SAE 30 dan sebagainya. Termasuk juga biaya bahan bakar dan pelumas untuk mesin pembangkit listrik (diesel) yang digunakan perusahaan.

- 5) **Pemakaian Listrik (Biaya Listrik):** Biaya seluruh pemakaian listrik untuk keperluan perusahaan/usaha, seperti untuk penerangan dan menjalankan mesin.
- 6) **Pemakaian Air:** Biaya pemakaian air bersih: biaya pembelian air bersih dari perusahaan air minum/badan pengoelolra air minum ataupun pihak lain untuk keperluan perusahaan/usaha.
- 7) **Pemakaian Gas Kota:** Biaya gas kota: biaya seluruh pemakaian gas kota untuk keperluan perusahaan/usaha.
- 8) **Alat tulis dan keperluan kantor:** Semua alat tulis dan keperluan kantor yang habis dipakai seperti: kertas, spidol, pensil, tinta, karbon, pita mesin tik, map, kapur tulis, dan sejenisnya.
- 9) **Bunga atas pinjaman:** Pengeluaran perusahaan untuk pembayaran bunga atas pinjaman modal kepada pihak lain, missal: bunga yang dibayarkan ke Bank, Pegadaian, dsb. Bunga yang dibayarkan tidak harus terhadap pinjaman pada tahun 2014 tetapi termasuk Bungan atas pinjaman tahun sebelumnya.
- 10) **Angkutan/pengiriman, pos dan telekomunikasi:** Seluruh biaya pengangkutan/pengiriman, pos dan telekomunikasi yang digunakan untuk kelancaran usaha.
- 11) **Pemeliharaan dan perbaikan kecil barang modal:** Pengeluaran ruti untuk memelihara atau memperbaiki barang modal agar tetap berfungsi seperti biasanya tanpa menambah kapasitas, mengubah bentuk atau menambah umur barang modal tersebut, seperti biaya penggantian suku cadang, pemeliharaan mesin-mesin dan perbaikan bangunan tempat usaha yang sifatnya tidak memperluas.
- 12) **Sewa mesin, alat perlengkapan, kendaraan, bangunan/konstruksi, dan barang modal lainnya:** Pengeluaran yang digunakan untuk keperluan usaha dan rumah tangga dimasukkan sebagai pengeluaran untuk usaha, kecuali pengeluaran untuk bangunan/konstruksi yang disewa. Penghitungan sewa bangunan dilakukan secara proporsional antara penggunaan bangunan untuk usaha dan runah tinggal. Pengisian

besarannya sewa bangunan/konstruksi hanya yang digunakan untuk usaha saja, tidak termasuk untuk kegiatan rumah tangga.

13) Sewa tanah untuk usaha: Biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan/usaha selama sebulan yang lalu (bulan terakhir berproduksi sebelum pencacahan) atas penggunaan tanah milik pihak lain.

14) Pajak tak langsung: Pajak yang dikenakan kepada konsumen melalui produsen terhadap pembelian barang/jasa, misalnya: pajak pertambahan nilai barang dan jasa, pajak bumi dan bangunan, bea masuk dan cukai, pajak ekspor, pajak hiburan dan retribusi (termasuk retribusi papan nama, iklan dsb), termasuk biaya STNK dan retribusi uji petik (kir) khusus untuk kendaraan operasional perusahaan/usaha. Tidak termasuk pajak yang dibayarkan oleh perusahaan untuk pemotongan pajak balas jasa pekerja.

15) Jasa lainnya

Pembayaran jasa lainnya: Seluruh pengeluaran atau jasa pihak lain yang dikeluarkan oleh perusahaan/usaha untuk kelancaran kegiatan/usaha ini seperti asuransi perusahaan, promosi/iklan, pengacara dll.

Biaya jasa akuntan/konsultan: Biaya yang dikeluarkan perusahaan/usaha kepada akuntan/konsultan, seperti: biaya penyusunan sistem dan pelaksanaan pembukuan, biaya pemeriksaan pembukuan dan penyusunan laporan, biaya konsultasi hukum, konsultasi keuangan dll.

Biaya untuk asuransi kerugian: Premi yang dibayar oleh perusahaan/usaha kepada perusahaan asuransi atas barang yang diasuransikan: seperti asuransi kebakaran, asuransi kendaraan dan asuransi barang modal lainnya.

Promosi/iklan: Biaya untuk promosi/iklan yang dilakukan oleh perusahaan sendiri: pasang spanduk, papan reklame (perusahaan membayar pajak reklame/iklan).

k. Pendapatan

Pendapatan meliputi pendapatan utama, pendapatan dari jasa industri (makloon), pendapatan dari kegiatan lain, dan pendapatan lainnya.

- 1) **Pendapatan Utama:** Nilai barang yang dihasilkan oleh suatu industri, baik produksi utama, sampingan maupun ikutan. Termasuk dalam produksi adalah barang yang telah siap untuk dipasarkan dan barang yang masih dalam proses (setengah jadi). Semua barang hasil produksi harus dinilai walaupun terjual (tunai maupun kredit), dikonsumsi sendiri, dihadiahkan, dan sebagainya.
- 2) **Pendapatan dari kegiatan lain:** Pendapatan yang diperoleh perusahaan dari kegiatan bukan utama tapi masih merupakan satu kesatuan usaha dan bukan merupakan kegiatan utama.
- 3) **Pendapatan lainnya:** Pendapatan/penerimaan dari kegiatan lain yang berkaitan dengan usaha, seperti: bunga atas simpanan di pihak lain atau meminjamkan ke pihak lain, deviden, royalty/hak cipta dan sejenisnya yang diterima, dan transfer dari pihak lain (sumbangan dan hadiah).

l. Harta yang dimiliki

- 1) **Harta:** Kekayaan yang berasal dari milik sendiri dan digunakan dalam suatu proses produksi sebagai suatu usaha ekonomi.
- 2) **Harta lancar:** Meliputi seluruh uang tunai, piutang usaha, dan barang-barang produksi/bahan baku/penolong yang tersedia.
- 3) **Harta tetap:** Peralatan dan perlengkapan usaha yang digunakan sebagai sarana/alat berproduksi/berusaha yang umumnya mempunyai umur pemakaian lebih dari setahun, meliputi:
 - a) Tanah
 - b) Bangunan/gedung
 - c) Mesin dan perlengkapan seperti: mesin jahit, kompor, lemari, dan sebagainya
 - d) Kendaraan
 - e) Harta tetap lainnya (hak cipta, hak paten)

m. Sumber modal: Menunjukkan kondisi yang sah secara hukum atas pemilikan modal usaha, modal lancar maupun modal tetap. Sumber modal dapat berasal dari:

- 1) **Milik sendiri:** Merupakan harta milik perusahaan/usaha sendiri tanpa adanya kontribusi/partisipasi dari perusahaan/usaha/pihak lain. Untuk usaha yang modalnya berasal dari 2 orang atau lebih dan orang tersebut ikut serta dalam pengelolaan usaha, dimasukkan dalam modal sendiri.
- 2) **Pihak lain:** Merupakan harta milik pihak lain, pengusaha tidak mempunyai kontribusi sama sekali. Yang dimaksud pihak lain dalam IMK13 adalah bank, koperasi, lembaga keuangan bukan bank, modal ventura, perorangan, keluarga dan lainnya.
 - a) **Bank:** Institusi/lembaga yang bergerak dalam bidang keuangan untuk melakukan kegiatan menerima, menyimpan, dan meminjamkan uang. Dalam hal tertentu untuk kemudian transaksi uang, bank juga mempunyai kewenangan untuk menerbitkan cek, atau surat berharga.
 - b) **Koperasi:** Organisasi ekonomi rakyat yang berwatak social, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan.
 - c) **Lembaga Keuangan Bukan Bank:** Lembaga keuangan selain Bank dan Koperasi, seperti misalnya pegadaian, sewa guna usaha (*leasing*), modal ventura, anjak piutang (*factoring*), lembaga kredit (perorangan maupun perusahaan) dan sebagainya.
 - d) **Modal Ventura:** Badan usaha yang melakukan kegiatan penyertaan modal ke dalam perusahaan pasangan usaha untuk jangka waktu tertentu, tidak termasuk Bank Muamalat/Bank Syariah.
 - e) **Keluarga/Famili:** Pihak-pihak yang masih mempunyai hubungan saudara/family, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hubungan secara langsung adalah hubungan sedarah, sedangkan

hubungan tidak langsung merupakan pertalian karena adanya perkawinan.

- f) **Lainnya:** Pihak lain yang bukan merupakan kegiatan bank, koperasi, Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), keluarga dan pinjaman perorangan.

n. Kendala dan Pemasaran

Bagian ini menjelaskan tentang kendala usaha pada tahun 2014, keanggotan koperasi, kemitraan usaha, bimbingan usaha, dan wilayah pemasaran.

- 1) **Bimbingan/Pelatihan/Penyuluhan:** Bimbingan/pelatihan/penyuluhan yang diikuti tenaga kerja selama tenaga kerja tersebut bekerja pada perusahaan/usaha responden dan ditugaskan oleh perusahaan, meskipun pelatihan yang diikuti tidak diselenggarakan oleh perusahaan yang bersangkutan.
- 2) **Bimbingan/Pelatihan/Penyuluhan Manajerial:** Jenis bimbingan/penyuluhan untuk meningkatkan keterampilan pengelolaan usaha secara umum.
- 3) **Bimbingan/Pelatihan/Penyuluhan Keterampilan/Teknik Produksi:** Jenis bimbingan/penyuluhan untuk meningkatkan kemampuan/keterampilan dalam teknik produksi.
- 4) **Bimbingan/Penyuluhan Pemasaran:** Jenis bimbingan/penyuluhan untuk meningkatkan pengetahuan tentang pemasaran, seperti cara mempelajari kebutuhan dan keinginan konsumen, cara melakukan penjualan dan promosi.
- 5) **Kemitraan:** Hubungan kerjasama dengan perusahaan/usaha lain (termasuk BUMN/BUMD) yang saling menguntungkan, memperkuat dan mendukung.

H. Data yang Disajikan

Data yang disajikan pada publikasi Gambaran Industri Mikro dan Kecil Provinsi Maluku Utara 2014 ini, menggunakan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) rev. 4 Tahun 2009, dengan rincian sebagai berikut:

a. Industri Makanan	KBLI : 10
b. Industri Minuman	KBLI : 11
c. Industri Tekstil	KBLI : 13
d. Industri Pakaian Jadi	KBLI : 14
e. Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (tidak termasuk furnitur), Barang Anyaman dari Rotan, Bambu dan sejenisnya	KBLI : 16
f. Industri Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	KBLI : 18
g. Industri Farmasi, Produksi Obat Kimia dan Obat Tradisional	KBLI : 21
h. Industri Barang Galian Bukan Logam	KBLI : 23
i. Industri Logam Dasar	KBLI : 24
j. Industri Barang Logam bukan Mesin dan Peralatannya	KBLI : 25
k. Industri Alat Angkut Lainnya	KBLI : 30
l. Industri Furnitur	KBLI : 31
m. Industri Pengolahan Lainnya	KBLI : 32
n. Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	KBLI : 33

Ringkasan Eksekutif

<http://jalut.bps.go.id>

RINGKASAN EKSEKUTIF

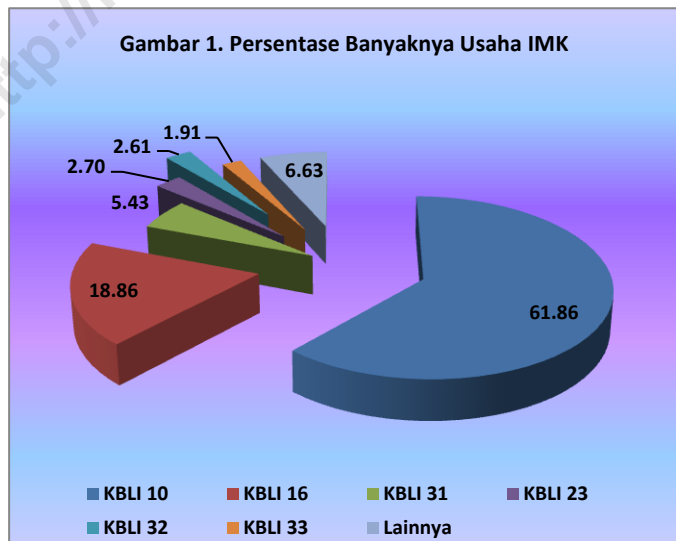
Industri Pengolahan Mikro dan Kecil

Pembangunan bidang industri merupakan bagian dari pembangunan nasional yang harus dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan, sehingga pembangunan bidang industri dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Kontribusi secara kongkret upaya peningkatan ekonomi masyarakat harus dilakukan dalam berbagai program, diantaranya pembangunan Industri Mikro dan Kecil (IMK). Sektor industri merupakan salah satu komponen utama dalam pembangunan ekonomi nasional.

Industri Mikro dan Kecil (IMK) merupakan kekuatan strategis dan penting untuk mempercepat pembangunan daerah. Sektor ini diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja. Di samping itu, IMK memiliki posisi penting dalam hal pemerataan kesejahteraan masyarakat di daerah dan mengurangi kesenjangan (*gap*) pendapatan. Usaha IMK umumnya merupakan usaha rumah tangga yang sebagian besar masih bercampur dengan tempat tinggalnya, dan masih memerlukan pembinaan yang terus menerus agar masalah yang dihadapi seperti masalah pemasaran, permodalan dan pengelolaan dapat segera diatasi.

A. Banyaknya Perusahaan/Usaha

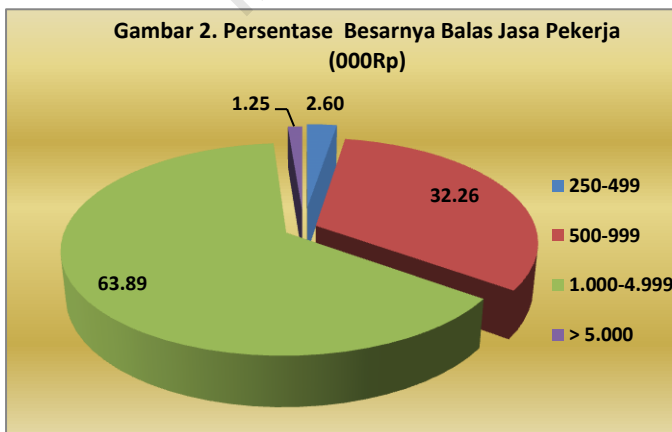
Hasil survei Industri Mikro dan Kecil Tahun 2014 (VIMK14) di Provinsi Maluku Utara, perusahaan/usaha IMK sebanyak 7.958 usaha (Tabel 1) yang terbagi dalam 23 Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2009 rev. 4 (empat). Banyaknya perusahaan/usaha diurutkan dari yang terbanyak, yaitu Industri Makanan (KBLI 10) sebanyak 4.923 usaha (61,86 persen), Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (tidak termasuk furnitur), Barang Anyaman dari Rotan, Bambu dan sejenisnya (KBLI 16) sebanyak 1.501 usaha (18,86 persen), dan Industri Furnitur (KBLI 31) sebanyak 432 usaha (5,43 persen). Perusahaan/usaha IMK terkecil, yaitu Industri Tekstil (KBLI 13) sebanyak 26 usaha (0,33 persen), Industri Barang Logam bukan Mesin dan Peralatannya (KBLI 25) sebanyak 32 usaha (0,40 persen), dan Industri Pakaian Jadi (KBLI 14) sebanyak 58 usaha (0,73 persen).



B. Tenaga Kerja dan Balas Jasa Pekerja

Banyaknya tenaga kerja perusahaan/usaha IMK di Provinsi Maluku Utara pada tahun 2014 terserap sebanyak 12.079 orang, yang terdiri dari 2.104 orang (17,42 persen) pekerja dibayar dan sebanyak 9.975 orang (82,58 persen) pekerja tidak dibayar. Dari pekerja dibayar, sebesar 82,27 persen (1.731 orang) merupakan pekerja laki-laki dan 17,73 persen (373 orang) pekerja perempuan. Sedangkan dari pekerja tidak dibayar, sebesar 34,05 persen (3.396 orang) adalah pekerja laki-laki dan sebesar 65,95 persen (6579 orang) pekerja perempuan.

Pekerja tidak dibayar di perusahaan/usaha IMK yang sebesar 82,58 persen tersebut di atas, mengindikasikan bahwa sebagian besar perusahaan/usaha IMK di Provinsi Maluku Utara tahun 2014 merupakan usaha yang bersifat kekeluargaan dan memiliki administrasi usaha yang belum baik. Sedangkan perusahaan/usaha IMK yang



melibatkan 17,42 persen pekerja dibayar, rata-rata balas jasa yang diterima per pekerja per bulan di Provinsi Maluku Utara pada

tahun 2014 untuk 1 (satu) juta rupiah atau lebih sebesar 65,14 persen, sedangkan balas jasa per pekerja per bulan dibawah satu juta rupiah sebesar 34,86 persen. Total balas jasa pekerja yang dibayarkan selama tahun 2014 di Provinsi Maluku Utara oleh seluruh perusahaan/usaha IMK yang menggunakan pekerja dibayar sebesar 31,80 milyar rupiah.

C. Pengeluaran dan Pendapatan

Dalam menjalankan usahanya, pengusaha IMK tidak terlepas dari biaya pengeluaran yang meliputi bahan baku bahan penolong, pengeluaran untuk bahan bakar dan pelumas, listrik, gas dan air, alat tulis dan keperluan kantor, angkutan/pengiriman, pos dan telekomunikasi, sewa gedung, sewa mesin, sewa alat-alat, biaya pemeliharaan dan perbaikan kecil barang modal, serta lainnya (kecuali pengeluaran untuk balas jasa pekerja). Di Provinsi Maluku Utara pada tahun 2014 dengan perusahaan/usaha IMK sebanyak 7.958 usaha, total pengeluarannya sebesar 268,88 milyar rupiah.

Sedangkan dari 7.958 usaha IMK pada tahun 2014 di Provinsi Maluku Utara, sebesar 7,40 persen usaha dengan pendapatan setahun kurang dari lima juta rupiah, sebesar 12,64 persen usaha dengan pendapatan setahun antara lima juta sampai sembilan juta rupiah, sebesar 22,87 persen usaha dengan pendapatan setahun antara sepuluh juta sampai dua puluh empat juta rupiah, sebesar 21,58 persen usaha dengan

pendapatan setahun antara dua puluh lima juta sampai empat puluh sembilan juta rupiah, sebesar 21,42 persen usaha dengan pendapatan setahun antara lima puluh juta sampai sembilan puluh sembilan juta rupiah, sebesar 8,60 persen usaha dengan pendapatan setahun antar seratus juta sampai seratus sembilan puluh Sembilan juta rupiah, 2,34 persen usaha dengan pendapatan setahun antar dua ratus juta sampai dua ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah, sebesar 1,38 persen usaha dengan pendapatan setahun antara tiga ratus juta sampai empat ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah, dan sebesar 0,97 persen usaha dengan pendapatan setahun antara lima ratus juta sampai sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah, serta sebesar 0,77 persen usaha dengan pendapatan setahun lebih dari satu milyar rupiah. Total pendapatan 7.958 perusahaan/usaha IMK di Provinsi Maluku Utara pada tahun 2014 sebesar 537,22 milyar rupiah.

D. Kendala dan Pemasaran

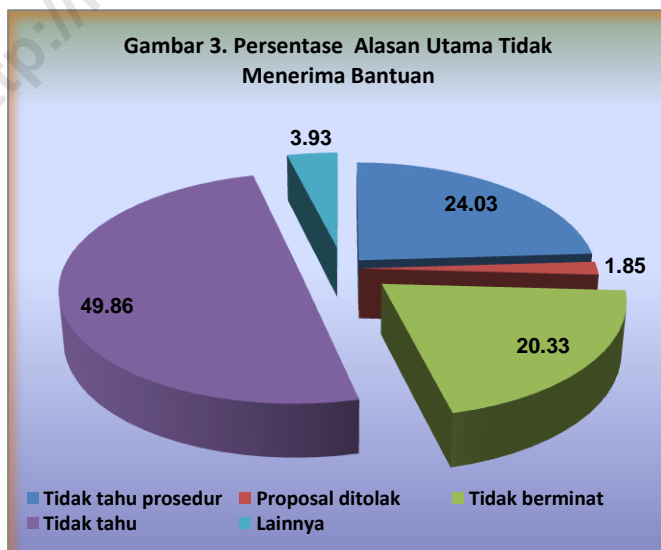
Sebagian besar atau sekitar 77,41 persen usaha IMK di Provinsi Maluku Utara pada tahun 2014 mengaku mengalami kesulitan dalam menjalankan usahanya. Tiga jenis kesulitan utama, yaitu kesulitan dalam permodalan 37,86 persen, kesulitan pemasaran 32,37 persen, dan kesulitan bahan baku 21,06 persen.

Pada umumnya 97,80 persen usaha IMK di Provinsi Maluku Utara pada tahun 2014 tidak pernah menerima bantuan dari lembaga non Koperasi dalam melaksanakan

kegiatan usahanya. Sisanya jenis bantuan yang diterima dari lembaga non Koperasi adalah bantuan uang/modal sebesar 77,71 persen, selanjutnya bantuan lainnya sebesar 14,86 persen, dan bantuan bahan baku sebesar 7,43 persen..

Di Provinsi Maluku Utara pada tahun 2014, manfaat Koperasi pada usaha IMK ternyata belum dirasakan oleh sebagian besar pengusaha IMK. Terlihat dari hasil survei Industri Mikro dan Kecil Tahun 2014, hanya 0,64 persen saja pengusaha yang menjadi anggota Koperasi. Di samping itu, sebagian besar pengusaha IMK yaitu sekitar 97,80 persen tidak menerima pelayanan Koperasi, sedangkan sisanya, dari pengusaha yang menerima pelayanan Koperasi sebesar 2.20 persen, lebih dari setengah bagiannya (64,00 persen) memanfaatkan pinjaman uang.

Mayoritas alasan utama usaha IMK tidak menerima bantuan dari koperasi maupun non koperasi dalam pengembangan usahanya adalah dikarenakan tidak tahu ada bantuan sebesar



49,86 persen, disusul tidak tahu prosedur mencapai 24,03 persen, dan proposal ditolak sekitar 1,85 persen. Yang menarik untuk diamati dari usaha IMK, adanya pengusaha tidak berminat terhadap bantuan pengembangan usaha yang disediakan lembaga koperasi maupun non koperasi, yaitu sebanyak 20,33 persen.

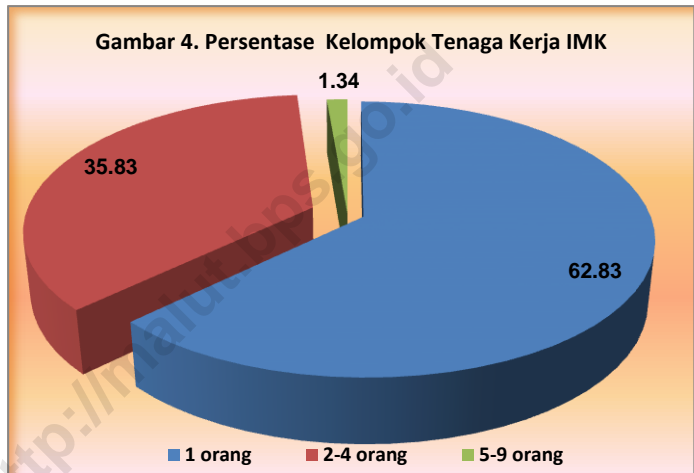
Sebanyak 77,41 persen usaha IMK di Provinsi Maluku Utara mengalami kesulitan, sedangkan yang tidak mengalami kesulitan hanya sebesar 22,59 persen. Jenis kesulitan utama bahan baku, yaitu sebesar 20,89 persen, yang terdiri dari bahan baku mahal sebesar 45,07 persen, bahan baku jauh sebesar 30,92 persen dan bahan baku langka sebesar 24,01 persen.

Tercatat dari hasil Survei Industri Mikro dan Kecil Tahun 2014 di Provinsi Maluku Utara, sekitar 90,68 persen usaha tidak menjalin kemitraan dan hanya sebesar 9,32 persen yang menjalin kemitraan.

E. Gambaran Industri Mikro dan Kecil

Mayoritas dari 7.958 usaha IMK pada tahun 2014 di Provinsi Maluku Utara adalah Industri Mikro, yakni usaha yang mempunyai tenaga kerja 1-4 orang, yaitu sebanyak 7.851 usaha (98,66 persen). Dengan rincian sebanyak 5.000 usaha (62,83

persen) merupakan usaha dengan jumlah tenaga kerja hanya 1 (satu) orang, sebanyak 2.851 usaha (35,53 persen) dengan jumlah tenaga kerja



antara 2-4 orang, dan sisanya sebanyak 107 usaha (1,34 persen) dengan jumlah tenaga kerja antara 5-9 orang.

Sedangkan sumber modal usaha IMK di Provinsi Maluku Utara pada tahun 2014 umumnya merupakan milik sendiri yaitu sebesar 94,53 persen, sebesar 3,12 persen usaha dengan modal sebagian dari pihak lain, dan sisanya sebesar 2,35 persen usaha adalah modal yang sepenuhnya dari pihak lain.

Rata-rata hari kerja dalam sebulan pada usaha IMK tahun 2014 di Provinsi Maluku Utara, yaitu antara 11-20 hari kerja sebesar 39,23 persen dengan rata-rata jam kerja per hari sekitar 6 (enam) jam. Sementara itu, usaha yang mempunyai rata-rata hari kerja dalam sebulan antara 1-10 hari dengan rata-rata jam kerja perhari sekitar 5 (lima) jam sebesar 31,00 persen, dan selebihnya 21 hari kerja atau lebih sebesar 29,77 persen dengan rata-rata jam kerja per hari sekitar 6 (enam) jam.

Tabel - Tabel

<http://markt.bps.go.id>

Tabel 1. Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil menurut Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014

Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia	Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil
(1)	(2)
10	4 923
11	68
13	26
14	58
16	1 501
18	61
21	72
23	215
24	104
25	32
30	106
31	432
32	208
33	152
Jumlah	7 958

Sumber : BPS (diolah)

Keterangan : *) Uraian kode dapat dilihat pada Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia

Tabel 2. Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil Di Wilayah Maluku-Papua menurut Kelompok Tenaga Kerja Tahun 2014

Provinsi	Banyaknya Usaha	Kelompok Tenaga Kerja	
		1	2 – 4
(1)	(2)	(3)	(4)
81 Maluku	36 640	21 795	14 627
82 Maluku Utara	7 958	5 000	2 851
91 Papua Barat	2 479	894	1 459
94 Papua	10 102	2 391	7 022

Lanjutan Tabel 2.

Provinsi	Kelompok Tenaga Kerja		
	5 – 9	10 – 14	15 – 19
(1)	(5)	(6)	(7)
81 Maluku	218	-	-
82 Maluku Utara	107	-	-
91 Papua Barat	110	16	-
94 Papua	641	48	-

Sumber : BPS (diolah)

Tabel 3. Banyaknya Usaha, Tenaga Kerja, Pendapatan, Pengeluaran, dan Balas Jasa Pekerja pada Usaha Mikro dan Kecil di Wilayah Maluku-Papua Tahun 2014

Provinsi	Banyaknya Usaha	Tenaga Kerja (Orang)		
		Dibayar	Tidak Dibayar	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
81 Maluku	36 640	9 389	46 990	56 379
82 Maluku Utara	7 958	2 104	9 975	12 079
91 Papua Barat	2 479	1 873	3 390	5 263
94 Papua	10 102	11 410	13 422	24 832

Lanjutan Tabel 3.

Provinsi	Banyaknya Usaha	Pendapatan (Juta Rp)	Pengeluaran (Juta Rp)	Balas Jasa Pekerja (Juta Rp)
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)
81 Maluku	36 640	1 752 810	861 429	58 999
82 Maluku Utara	7 958	537 222	268 827	31 799
91 Papua Barat	2 479	416 037	207 996	57 532
94 Papua	10 102	3 876 366	1 688 138	332 030

Sumber : BPS (diolah)

Tabel 4. Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil dan Rata-rata Jam Kerja per Hari di Wilayah Maluku-Papua menurut Jumlah Hari Kerja dalam Sebulan Tahun 2014

Provinsi	Jumlah Hari Kerja dalam Sebulan			
	1 – 10		11 – 20	
	Banyaknya Usaha	Rata-rata Jam Kerja Per Hari	Banyaknya Usaha	Rata-rata Jam Kerja Per Hari
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
81 Maluku	5 366	6	12 045	6
82 Maluku Utara	2 467	5	3 122	6
91 Papua Barat	276	5	730	6
94 Papua	1 730	5	2 703	6

Lanjutan Tabel 4.

Provinsi	Jumlah Hari Kerja dalam Sebulan		Jumlah	
	21 – 31			
	Banyaknya Usaha	Rata-rata Jam Kerja Per Hari	Banyaknya Usaha	Rata-rata Jam Kerja Per Hari
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)
81 Maluku	19 229	6	36 640	6
82 Maluku Utara	2 369	6	7 958	6
91 Papua Barat	1 473	7	2 479	6
94 Papua	5 669	7	10 102	6

Sumber : BPS (diolah)

Tabel 5. Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil di Wilayah Maluku-Papua menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Pengusaha Tahun 2014

Provinsi	Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Pengusaha			
	Tidak Tamat SD	SD	SMP	SMA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
81 Maluku	2 684	13 426	10 964	9 075
82 Maluku Utara	1 303	3 297	1 898	1 355
91 Papua Barat	606	689	575	558
94 Papua	1 239	3 083	3 111	2 407

Lanjutan Tabel 5.

Provinsi	Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Pengusaha			Jumlah
	Diploma I/II	Sarjana Muda/ Diploma III	Sarjana (S1) dan Lebih Tinggi	
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)
81 Maluku	237	56	198	36 640
82 Maluku Utara	53	13	39	7 958
91 Papua Barat	6	9	36	2 479
94 Papua	13	56	193	10 102

Sumber : BPS (diolah)

Tabel 6. Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil di Wilayah Maluku-Papua menurut Kelompok Umur Pengusaha Tahun 2014

Provinsi	Banyaknya Usaha	Kelompok Umur Pengusaha	
		< 24	20 – 24
(1)	(2)	(3)	(4)
81 Maluku	36 640	44	184
82 Maluku Utara	7 958	-	74
91 Papua Barat	2 479	6	21
94 Papua	10 102	-	49

Lanjutan Tabel 6.

Provinsi	Kelompok Umur Pengusaha		
	25 – 44	45 – 64	> 64
(1)	(5)	(6)	(7)
81 Maluku	15 675	18 571	2 166
82 Maluku Utara	3 966	3 681	237
91 Papua Barat	1 236	1 109	107
94 Papua	5 596	4 138	319

Sumber : BPS (diolah)

Tabel 7. Banyaknya Tenaga Kerja pada Usaha Mikro dan Kecil di Wilayah Maluku-Papua menurut Jenis Kelamin dan Jenis Tenaga Kerja Tahun 2014

Provinsi	Laki-laki		
	Jenis Tenaga Kerja		
	Produksi	Lainnya	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
81 Maluku	32 285	297	32 582
82 Maluku Utara	4 965	162	5 127
91 Papua Barat	3 444	72	3 516
94 Papua	18 534	578	19 112

Lanjutan Tabel 7.

Provinsi	Perempuan		
	Jenis Tenaga Kerja		
	Produksi	Lainnya	Jumlah
(1)	(5)	(6)	(7)
81 Maluku	22 912	885	23 797
82 Maluku Utara	6 768	184	6 952
91 Papua Barat	1 685	62	1 747
94 Papua	5 383	337	5 720

Lanjutan Tabel 7.

Provinsi	Jumlah		
	Jenis Tenaga Kerja		
	Produksi	Lainnya	Jumlah
(1)	(8)	(9)	(10)
81 Maluku	55 197	1 182	56 379
82 Maluku Utara	11 733	346	12 079
91 Papua Barat	5 129	134	5 263
94 Papua	23 197	915	24 832

Sumber : BPS (diolah)

Tabel 8. Banyaknya Tenaga Kerja pada Usaha Mikro dan Kecil di Wilayah Maluku-Papua menurut Status Pekerja dan Jenis Kelamin Tahun 2014

Provinsi	Pekerja Dibayar		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
81 Maluku	6 424	2 965	9 389
82 Maluku Utara	1 731	373	2 104
91 Papua Barat	1 681	192	1 873
94 Papua	10 613	797	11 410

Lanjutan Tabel 8.

Provinsi	Pekerja Tidak Dibayar		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(5)	(6)	(7)
81 Maluku	26 158	20 832	46 990
82 Maluku Utara	3 396	6 579	9 975
91 Papua Barat	1 835	1 555	3 390
94 Papua	8 499	4 923	13 422

Lanjutan Tabel 8.

Provinsi	Jumlah		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(8)	(9)	(10)
81 Maluku	32 582	23 797	56 379
82 Maluku Utara	5 127	6 952	12 079
91 Papua Barat	3 516	1 747	5 263
94 Papua	19 112	5 720	24 832

Sumber : BPS (diolah)

Tabel 9. Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil di Wilayah Maluku-Papua menurut Balas Jasa per Pekerja Dibayar per Bulan Tahun 2014

Provinsi	Banyaknya Usaha	Banyaknya Usaha dengan Pekerja Dibayar	Banyaknya Balas Jasa per Pekerja per Bulan dalam Kelompok Ribuan Rupiah	
			< 100	100-249
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
81 Maluku	36 640	4 041	65	873
82 Maluku Utara	7 958	961	-	-
91 Papua Barat	2 479	826	-	-
94 Papua	10 102	4 186	-	13

Lanjutan Tabel 9.

Provinsi	Banyaknya Usaha	Banyaknya Usaha dengan Pekerja Dibayar	Banyaknya Balas Jasa per Pekerja per Bulan dalam Kelompok Ribuan Rupiah	
			250-499	500-999
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)
81 Maluku	36 640	4 041	788	1 248
82 Maluku Utara	7 958	961	25	310
91 Papua Barat	2 479	826	4	44
94 Papua	10 102	4 186	232	267

Lanjutan Tabel 9.

Provinsi	Banyaknya Usaha	Banyaknya Usaha dengan Pekerja Dibayar	Banyaknya Balas Jasa per Pekerja per Bulan dalam Kelompok Ribuan Rupiah	
			1.000-4.999	≥ 5.000
(1)	(2)	(3)	(8)	(9)
81 Maluku	36 640	4 041	1 023	44
82 Maluku Utara	7 958	961	614	12
91 Papua Barat	2 479	826	753	25
94 Papua	10 102	4 186	3 551	123

Sumber : BPS (diolah)

Tabel 10. Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil di Wilayah Maluku-Papua menurut Besaran Pendapatan Setahun Tahun 2014

Provinsi	Besaran Pendapatan Setahun (Jutaan Rupiah)			
	< 5	5–9	10–24	25–49
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
81 Maluku	2 550	4 235	10 009	10 258
82 Maluku Utara	589	1 006	1 820	1 717
91 Papua Barat	34	56	290	393
94 Papua	65	416	980	1 147

Lanjutan Tabel 10.

Provinsi	Besaran Pendapatan Setahun (Jutaan Rupiah)			
	50–99	100-199	200-299	300-499
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)
81 Maluku	6 878	1 814	304	253
82 Maluku Utara	1 705	684	189	110
91 Papua Barat	388	752	225	173
94 Papua	1 341	1 604	1 098	1 420

Lanjutan Tabel 10.

Provinsi	Besaran Pendapatan Setahun (Jutaan Rupiah)		Jumlah
	500-999	≥ 1.000	
(1)	(10)	(11)	(12)
81 Maluku	251	88	36 640
82 Maluku Utara	77	61	7 958
91 Papua Barat	133	35	2 479
94 Papua	670	1 361	10 102

Sumber : BPS (diolah)

Tabel 11. Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil di Wilayah Maluku-Papua menurut Sumber Modal Tahun 2014

Provinsi	Sumber Modal			Jumlah
	Sepenuhnya Milik Sendiri	Sebagian dari Pihak Lain	Sepenuhnya dari Pihak Lain	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
81 Maluku	35 400	1 165	75	36 640
82 Maluku Utara	7 523	248	187	7 958
91 Papua Barat	2 124	286	69	2 479
94 Papua	8 726	1 015	361	10 102

Sumber : BPS (diolah)

Tabel 12. Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil di Wilayah Maluku-Papua menurut Asal Pinjaman Utama Tahun 2014

Provinsi	Banyaknya Usaha	Tidak Memanfaatkan Pinjaman	Memanfaatkan Pinjaman
(1)	(2)	(3)	(4)
81 Maluku	36 640	35 400	1 240
82 Maluku Utara	7 958	7 523	435
91 Papua Barat	2 479	2 124	355
94 Papua	10 102	8 726	1 376

Lanjutan Tabel 12.

Provinsi	Asal Pinjaman Utama			
	Bank	Koperasi	Lembaga Keuangan Bukan Bank	Modal Ventura
(1)	(5)	(6)	(7)	(8)
81 Maluku	518	264	163	-
82 Maluku Utara	143	39	13	-
91 Papua Barat	176	64	7	-
94 Papua	1 033	77	-	-

Lanjutan Tabel 12.

Provinsi	Asal Pinjaman Utama			
	Mitra Kerja	Perorangan	Keluarga	Lainnya
(1)	(9)	(10)	(11)	(12)
81 Maluku	-	44	119	132
82 Maluku Utara	155	37	35	13
91 Papua Barat	10	60	38	-
94 Papua	44	102	70	50

Sumber : BPS (diolah)

Tabel 13. Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil di Wilayah Maluku-Papua menurut Alasan Utama Tidak Meminjam dari Bank Tahun 2014

Provinsi	Banyaknya Usaha yang Memanfaatkan Pinjaman	Meminjam dari Bank	Tidak Meminjam dari Bank
	(2)	(3)	(4)
(1)			
81 Maluku	1 240	593	647
82 Maluku Utara	435	156	279
91 Papua Barat	355	222	133
94 Papua	1 376	1 056	320

Lanjutan Tabel 13.

Provinsi	Alasan Utama Tidak Meminjam dari Bank		
	Tiak Tahu Prosedur	Prosedur Sulit	Tidak Ada Agunan
(1)	(5)	(6)	(7)
81 Maluku	119	179	-
82 Maluku Utara	114	13	62
91 Papua Barat	18	13	10
94 Papua	100	26	26

Lanjutan Tabel 13.

Provinsi	Alasan Utama Tidak Meminjam dari Bank		
	Suku Bunga Tinggi	Usulan Ditolak	Tidak Berminat
(1)	(8)	(9)	(10)
81 Maluku	-	-	352
82 Maluku Utara	13	9	68
91 Papua Barat	24	12	56
94 Papua	39	13	117

Sumber : BPS (diolah)

Tabel 14. Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil di Wilayah Maluku-Papua yang Meminjam dari Bank menurut Besarnya Pinjaman Tahun 2014

Provinsi	Banyaknya Usaha yang Memanfaatkan Pinjaman	Meminjam dari Bank	Tidak Meminjam dari Bank
	(2)	(3)	(4)
(1)			
81 Maluku	1 240	593	647
82 Maluku Utara	435	156	279
91 Papua Barat	355	222	133
94 Papua	1 376	1 056	320

Lanjutan Tabel 14.

Provinsi	Besarnya Pinjaman Bank		
	< Rp. 20 Juta	Rp. 20-500 Juta	> Rp. 500 Juta
(1)	(5)	(6)	(7)
81 Maluku	432	161	-
82 Maluku Utara	67	89	-
91 Papua Barat	65	144	13
94 Papua	337	684	35

Sumber : BPS (diolah)

Tabel 15. Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil di Wilayah Maluku-Papua menurut Jenis Kredit Bersubsidi Tahun 2014

Provinsi	Meminjam dari Bank	Pinjaman Kredit Bersubsidi	Bukan Pinjaman Kredit Bersubsidi
(1)	(2)	(3)	(4)
81 Maluku	593	409	184
82 Maluku Utara	156	105	51
91 Papua Barat	222	65	157
94 Papua	1 056	519	537

Lanjutan Tabel 15.

Provinsi	Jenis Kredit Bersubsidi			
	Kredit Usaha Rakyat (KUR)	Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KPPE)	Pinjaman Bergulir PNPMM	Lainnya
(1)	(5)	(6)	(7)	(8)
81 Maluku	321	-	88	-
82 Maluku Utara	52	-	39	14
91 Papua Barat	49	-	6	10
94 Papua	381	-	138	-

Sumber : BPS (diolah)

Tabel 16. Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil di Wilayah Maluku-Papua menurut Jenis Kesulitan Utama Tahun 2014

Provinsi	Banyaknya Usaha	Tidak Mengalami Kesulitan	Mengalami Kesulitan
(1)	(2)	(3)	(4)
81 Maluku	36 640	10 050	26 590
82 Maluku Utara	7 958	1 798	6 160
91 Papua Barat	2 479	405	2 074
94 Papua	10 102	3 029	7 073

Lanjutan Tabel 16.

Provinsi	Jenis Kesulitan			
	Bahan Baku	Pemasaran	Modal	BBM/ Energi
(1)	(5)	(6)	(7)	(8)
81 Maluku	4 634	9 220	10 022	841
82 Maluku Utara	1 297	1 994	2 332	104
91 Papua Barat	561	513	533	178
94 Papua	1 272	1 871	3 067	295

Lanjutan Tabel 16.

Provinsi	Jenis Kesulitan			
	Transportasi	Keterampilan	Upah Buruh	Lainnya
(1)	(9)	(10)	(11)	(12)
81 Maluku	542	629	65	637
82 Maluku Utara	214	61	26	142
91 Papua Barat	40	27	11	211
94 Papua	86	138	76	268

Sumber : BPS (diolah)

Tabel 17. Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil di Wilayah Maluku-Papua menurut Jenis Kesulitan Utama Bahan Baku Tahun 2014

Provinsi	Banyaknya Usaha	Tidak Mengalami Kesulitan	Mengalami Kesulitan	
			Selain Bahan Baku	Bahan Baku
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
81 Maluku	36 640	10 050	21 956	4 634
82 Maluku Utara	7 958	1 798	4 873	1 287
91 Papua Barat	2 479	405	1 513	561
94 Papua	10 102	3 029	5 801	1 272

Lanjutan Tabel 17.

Provinsi	Jenis Kesulitan Utama Bahan Baku			
	Langka	Mahal	Jauh	Lainnya
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)
81 Maluku	1 919	1 728	954	33
82 Maluku Utara	309	580	398	-
91 Papua Barat	141	244	172	4
94 Papua	359	237	638	38

Sumber : BPS (diolah)

Tabel 18. Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil di Wilayah Maluku-Papua yang Menjalinkan Kemitraan dengan Usaha Lain menurut Jenis Kemitraan yang Diterima Tahun 2014

Provinsi	Banyaknya Usaha	Tidak Menjalinkan Kemitraan	Menjalinkan Kemitraan
(1)	(2)	(3)	(4)
81 Maluku	36 640	35 817	823
82 Maluku Utara	7 958	7 207	751
91 Papua Barat	2 479	2 330	149
94 Papua	10 102	8 686	1 416

Lanjutan Tabel 18.

Provinsi	Jenis Kemitraan yang Diterima		
	Pinjaman Uang	Pengadaan Bahan Baku	Pemasaran
(1)	(5)	(6)	(7)
81 Maluku	173	77	596
82 Maluku Utara	95	153	589
91 Papua Barat	-	50	114
94 Papua	381	151	922

Lanjutan Tabel 18.

Provinsi	Jenis Kemitraan yang Diterima		
	Mesin	Barang Modal	Lainnya
(1)	(9)	(10)	(11)
81 Maluku	33	-	21
82 Maluku Utara	156	13	-
91 Papua Barat	-	5	7
94 Papua	-	-	-

Sumber : BPS (diolah)

Tabel 19. Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil di Wilayah Maluku-Papua menurut Badan/Lembaga yang Menjalinkan Kemitraan Tahun 2014

Provinsi	Banyaknya Usaha	Tidak Menjalinkan Kemitraan	Menjalinkan Kemitraan
(1)	(2)	(3)	(4)
81 Maluku	36 640	35 817	823
82 Maluku Utara	7 958	7 207	751
91 Papua Barat	2 479	2 330	149
94 Papua	10 102	8 686	1 416

Lanjutan Tabel 19.

Provinsi	Badan/Lembaga yang Memberi Bantuan		
	BUMN/BUMD	Swasta	Perbankan
(1)	(5)	(6)	(7)
81 Maluku	44	33	85
82 Maluku Utara	13	50	39
91 Papua Barat	-	-	5
94 Papua	68	162	343

Lanjutan Tabel 19.

Provinsi	Badan/Lembaga yang Memberi Bantuan	
	LSM	Lainnya
(1)	(8)	(9)
81 Maluku	-	694
82 Maluku Utara	-	675
91 Papua Barat	-	144
94 Papua	479	382

Sumber : BPS (diolah)

Tabel 20. Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil yang menjadi Anggota Koperasi di Wilayah Maluku-Papua menurut Jenis Pelayanan yang Diterima Tahun 2014

Provinsi	Banyaknya Usaha	Bukan Anggota Koperasi	Anggota Koperasi	Tidak Menerima Pelayanan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
81 Maluku	36 640	35 859	781	35 832
82 Maluku Utara	7 958	7 907	51	7 783
91 Papua Barat	2 479	2 405	74	2 435
94 Papua	10 102	9 835	267	9 469

Lanjutan Tabel 20.

Provinsi	Menerima Pelayanan	Jenis Pelayanan yang diterima Setahun yang Lalu		
		Uang	Bahan Baku	Pemasaran
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)
81 Maluku	808	720	-	44
82 Maluku Utara	175	112	13	-
91 Papua Barat	44	30	6	14
94 Papua	633	501	-	7

Lanjutan Tabel 20.

Provinsi	Menerima Pelayanan	Jenis Pelayanan yang diterima Setahun yang Lalu		
		Mesin	Barang Modal	Lainnya
(1)	(6)	(10)	(11)	(12)
81 Maluku	808	-	44	-
82 Maluku Utara	175	-	24	26
91 Papua Barat	44	-	-	-
94 Papua	633	50	25	50

Sumber : BPS (diolah)

Tabel 21. Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil yang Menerima Pelayanan/ Bantuan di Wilayah Maluku-Papua menurut Badan/Lembaga yang Memberi Bantuan Tahun 2014

Provinsi	Banyaknya Usaha	Tidak Pernah Menerima Pelayanan/ Bantuan	Pernah Menerima Pelayanan/ Bantuan
(1)	(2)	(3)	(4)
81 Maluku	36 640	35 832	808
82 Maluku Utara	7 958	7 783	175
91 Papua Barat	2 479	2 435	44
94 Papua	10 102	9 469	633

Lanjutan Tabel 21.

Provinsi	Badan/Lembaga yang Memberi Bantuan		
	Pemerintah	Koperasi	Swasta
(1)	(5)	(6)	(7)
81 Maluku	44	363	44
82 Maluku Utara	63	26	-
91 Papua Barat	7	31	-
94 Papua	270	65	25

Lanjutan Tabel 21.

Provinsi	Badan/Lembaga yang Memberi Bantuan		
	Perbankan	LSM	Lainnya
(1)	(8)	(9)	(10)
81 Maluku	181	-	176
82 Maluku Utara	14	-	72
91 Papua Barat	-	-	6
94 Papua	212	-	61

Sumber : BPS (diolah)

Tabel 22. Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil di Wilayah Maluku-Papua menurut Alasan Utama Tidak Menerima Pelayanan/Bantuan Tahun 2014

Provinsi	Banyaknya Usaha	Alasan Utama Tidak menerima Pelayanan/Bantuan	
		Tidak Tahu Prosedur	Proposal Ditolak
(1)	(2)	(3)	(4)
81 Maluku	36 640	7 633	385
82 Maluku Utara	7 958	1 870	144
91 Papua Barat	2 479	426	6
94 Papua	10 102	2 314	326

Lanjutan Tabel 22.

Provinsi	Alasan Utama Tidak menerima Pelayanan/Bantuan		
	Tidak Berminat	Tidak Tahu	Lainnya
(1)	(5)	(6)	(7)
81 Maluku	7 374	18 826	1 614
82 Maluku Utara	1 582	3 881	306
91 Papua Barat	118	1 758	127
94 Papua	2 112	4 218	499

Sumber : BPS (diolah)

Tabel 23. Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil di Wilayah Maluku-Papua menurut Lokasi Pemasaran Hasil Produksi Tahun 2014

Provinsi	Banyaknya Usaha	Lokasi Pemasaran			Luar Negeri
		Dalam Satu Kabupaten/ Kota	Luar Kabupaten/ Kota	Luar Provinsi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
81 Maluku	36 640	35 804	2 891	73	17
82 Maluku Utara	7 958	7 832	619	89	-
91 Papua Barat	2 479	2 473	91	16	-
94 Papua	10 102	10 089	1 846	330	-

Sumber : BPS (diolah)

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**Badan Pusat Statistik
Provinsi Maluku Utara**

Jalan Stadion No. 65 Ternate, Maluku Utara 97712,
Telp (0921) 3127878, Faks (0921) 3126301
Homepage : <http://malut.bps.go.id>
E-mail: bps8200@bps.go.id